



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Friendly Talk
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 26 Januari 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Tamu Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 3
Acara	: 1. Pertemuan dengan Vincent Guerend (Ambasador of European Union) Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 2. Lain – lain
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. Ketua BKSAP DPR RI
Sekretaris Rapat	: Kepala Biro BKSAP Endah T.D. Retnoastuti.

KEPUTUSAN / KESIMPULAN

I. Pendahuluan

Rapat dibuka oleh Ketua BKSAP DPR RI Ibu Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. pada pukul 10.00 WIB.

II. Kesimpulan / Keputusan

1. Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan bahwa pertemuan pada hari ini adalah dalam rangka penguatan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa.
2. Atas nama Group Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Republik Indonesia, Ketua BKSAP DPR RI mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden yang baru terpilih dari Parlemen Eropa, Yang Mulia Antonio Tajani, MEP. Indonesia mengharapkan kerjasama parlemen dari kedua belah pihak akan lebih kuat di bawah kepemimpinannya.
3. Indonesian menyambut baik reaktivasi Parlemen Persahabatan Group Indonesia-Eropa (IEPFG). reaktivasi kelompok menegaskan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk parlemen dalam memperkuat hubungan Indonesia-Uni Eropa berdasarkan kepentingan yang saling menguntungkan.

4. Indonesian menyadari sepenuhnya bahwa dengan dukungan dari parlemen, kedua belah pihak akan semakin kuat, saling menghormati dan kerjasama yang saling menguntungkan di beberapa daerah. Indonesia pada saat ini dalam proses pembentukan kelompok persahabatan parlemen serupa untuk Parlemen Uni Eropa. Kami mengharapkan bahwa setelah pembentukan kelompok tersebut, kerangka formal kerjasama parlemen dapat dibentuk untuk merebut peluang parlemen-to-parlemen kerjasama di masa depan.
5. Indonesian menghargai upaya Uni Eropa untuk terlibat dengan ASEAN melalui berbagai forum dialog termasuk Komite Brussels ASEAN. Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait ASEAN termasuk resolusi tentang Situasi Rohingya Minoritas di Myanmar. Dalam kapasitas saya sebagai Presiden Komite untuk Mempromosikan Menghormati Hukum Humaniter Internasional, saya telah mengirim surat kepada IPU untuk setiap keterlibatan parlemen pada kasus Rohingya ini. Kami telah menerima informasi signifikan mengenai Parlemen Myanmar yang terlibat dalam Komite Investigasi Nasional untuk menyelesaikan kasus ini.
6. Kami berharap bahwa di masa depan Uni Eropa dan ASEAN serta Indonesia dapat mengambil peran yang lebih konstruktif dalam mengelola situasi kedua komunitas.
7. Dalam IPU, Parlemen Uni Eropa dan IPU adalah co-penyelenggara Sidang Tahunan Konferensi Parlemen WTO. Kami berterima kasih atas dukungan Anda dalam membawa isu dari perdagangan multilateral dalam kerjasama parlemen.
8. Indonesia dan Uni Eropa berbagi hubungan yang kuat. Kita telah memasuki Kemitraan dan Perjanjian Komprehensif (PCA) meliputi beberapa daerah kemitraan termasuk perdagangan, lingkungan, energi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kontra-terorisme, demokrasi, dan lain sebagainya.
9. Kerjasama Uni Eropa-Indonesia telah mendapatkan momentum yang baik menyusul kunjungan Presiden Jokowi ke Brussels pada bulan April 2016. Dalam hal ini, Parlemen Eropa dan Indonesia memiliki peran penting dalam momentum tersebut. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan yang tepat mengenai Perjanjian Kemitraan Komprehensif (PCA). Hal ini dipandang perlu untuk membentuk suatu forum parlemen bilateral untuk bertemu dan bertukar pandangan dan ide-ide. Kunjungan parlemen timbal balik antara kedua pihak akan dilaksanakan secepat mungkin. Keterlibatan tersebut akan melengkapi pertemuan pertama Uni Eropa-Indonesia Joint Committee yang dilakukan di bawah PCA November lalu.
10. Indonesian menyambut baik Pernyataan Bersama antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Uni Eropa Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan di 1 Dialog Strategis Tingkat Menteri yang diselenggarakan di Jakarta, April 2016. Pernyataan bersama pertama ini akan menjadi dokumen strategis yang lay out karya fundamental Indonesia-Uni Eropa di masa depan. Beberapa masalah yang disorot

termasuk upaya terkoordinasi untuk mencegah kekerasan ekstremisme dan untuk mengatasi akar penyebab dan kebutuhan untuk kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk mengatasi ancaman terorisme global dan kesimpulan awal Konvensi Komprehensif pada Terorisme Internasional di PBB. Kami siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya untuk melaksanakan komitmen yang digariskan dalam Pernyataan Bersama.

11. Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa semakin kuat. Total perdagangan bilateral barang antara Uni Eropa dan Indonesia mencapai 25,3 miliar Euro pada tahun 2015 menghasilkan surplus 5,4 miliar Euro untuk Indonesia peningkatan yang signifikan dari surplus tahun sebelumnya sebesar 3,6 miliar Euro. Uni Eropa juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan Uni Eropa investasi asing langsung (FDI) sebesar USD 2,2 miliar pada 2015. Kami percaya bahwa angka-angka ini belum mencapai potensi maksimal mereka. Dalam ASEAN, perdagangan Uni Eropa-Indonesia hanya peringkat 5 dibandingkan dengan perdagangan Uni Eropa dengan negara-negara anggota ASEAN lain.
12. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (CEPA) yang saat ini sedang dinegosiasikan akan meningkatkan perdagangan yang belum dimanfaatkan dan potensi ekonomi kedua negara. Saya juga ingin menekankan bahwa CEPA harus disimpulkan dengan win-win solution bagi kedua belah pihak dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.
13. Kerja sama antara kedua belah pihak, akan bermakna jika kita melaksanakannya dengan prinsip saling menghormati termasuk penghormatan penuh pada kedaulatan dan wilayah Indonesia. Kami menyadari Resolusi Parlemen Eropa baru-baru ini di Indonesia, terutama kasus Hosea Yeimo dan Ismael Alua dan Gubernur Jakarta yang diadopsi pada tanggal 19 Januari 2017. Kami menyatakan keprihatinan kami bahwa dalam debat ada beberapa miss-informasi pada situasi dari Indonesia yang diangkat oleh beberapa anggota parlemen Eropa yang mengarah pada adopsi resolusi.
14. Resolusi itu juga menyoroti isu-isu hak asasi manusia dari Indonesia termasuk dimulainya kembali hukuman mati serta artikel penghujatan yang diatur dalam berbagai undang-undang. Kami perhatikan posisi Uni Eropa pada hukuman mati. Namun, hukuman mati masih ada dalam UU Indonesia dan bahwa pelaksanaan hukuman tersebut hanya akan selektif diberikan terhadap pelaku kejahatan luar biasa yang sangat berdampak bangsa, termasuk aksi teror dan kejahatan terkait narkoba. Indonesia juga memastikan bahwa proses hukum telah sepenuhnya diterapkan untuk pelaku dan semua solusi hukum nasional yang tersedia telah dilakukan.
15. Pada kesempatan ini kami bisa memberikan beberapa penjelasan tentang situasi Indonesia. Saya berharap bahwa di masa depan, di bawah kerangka kerja sama parlemen, baik Indonesia dan Parlemen Eropa dapat mengembangkan dialog

komprehensif termasuk di bidang demokrasi dan hak asasi manusia dan membangun berbagai kerjasama di tingkat parlemen.

16. Indonesian menyambut pelaksanaan Dialog Indonesia-Uni Eropa Tahunan Hak Asasi Manusia diluncurkan pada 2010. Dialog berfungsi sebagai platform yang memungkinkan untuk pertukaran terbuka dan jujur tentang perkembangan terbaru, kebijakan dan tantangan di rumah dan di luar negeri pada berbagai isu hak asasi manusia termasuk dialog antaragama. Indonesia dan Uni Eropa sebagai masyarakat majemuk dapat belajar pada keharmonisan hidup di antara berbagai agama dan etnis. Namun, banyak stereotip dan stigmatisasi terjadi karena tindakan beberapa orang yang terkait dengan kelompok-kelompok tertentu, etnis atau agama. Saya percaya bahwa ini yang terjadi di banyak masyarakat termasuk di Indonesia dan Uni Eropa. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia mendapatkan banyak perhatian.

III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



Drs. Robert Juheng Purba
NIP. 19620703 199203 1 002